

## Pembangunan Akses Baru SMP 7 Batal



*SUMBER :KALTIMPOST.CO.ID JUMAT, 14/02/2025*

**BONTANG** - Polemik mengenai tertutupnya akses masuk SMP 7 sesungguhnya sudah diantisipasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Kala itu di APBD Perubahan sempat memasukkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur gapura tersebut. Namun ternyata pengalokasian itu batal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan ada keterlambatan pengerjaan dari kontraktor.

Setelah mengajukan permohonan pemberian kesempatan atau perpanjangan selama 15 hari. “Makanya Disdikbud tidak bisa kerja karena proyek itu belum selesai saat itu,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo tersebut. Menurutnya, akses baru nantinya paling memungkinkan ialah menggeser tangga di sekolah. Sebab jika membuka dinding sebelah kiri dari gapura yang tertutup dirasa tidak memungkinkan. “Karena perlu timbunan yang tinggi,” ucapnya.

Akses masuk baru nantinya pun bersifat sementara. Seyogyanya dalam beberapa tahun ke depan SMP 7 akan dilakukan relokasi ke lahan baru yakni di samping SD 010 Bontang Utara, Gunung Elai. Sementara Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono menuturkan pihaknya sebelumnya telah berdiskusi dengan Dinas PUPRK dan direksi PDAM Tirta Taman.

Namun dengan usulan dari Komisi A ia pun menerima dengan pencarian solusi terbaik. “Kami akan pelajari terlebih dahulu usulan tersebut. Pada intinya kami siap duduk bersama untuk membahas ini,” tutur dia. Ia pun membenarkan sempat ada anggaran untuk pembuatan akses melalui APBD Perubahan.

Tetapi karena prosesnya panjang sehingga tidak bisa terpakai. Khusus untuk ke depan anggaran untuk pembuatan infrastruktur ini masih menunggu pergeseran mendahului perubahan. “Kebutuhan anggaran mencapai Rp200 juta,” terangnya.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Bontang telah melakukan kunjungan lapangan beberapa hari lalu. Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mengatakan legislator ingin mencarikan solusi dari kejadian tersebut. “Jadi setelah melakukan pembicaraan dengan pihak sekolah maka ada dua opsi yang bisa digunakan untuk akses masuk,” kata Heri.

Politikus Partai Gerindra ini menilai sebelah kanan dan kiri titik gapura lama berpotensi menjadi akses masuk. Khusus sebelah kiri maka akan membongkar Aula II sekolah yang saat ini juga dijadikan tempat kegiatan belajar-mengajar. Aula ini memiliki atap tetapi bagian sampingnya tidak ber dinding.

Sementara opsi kedua ialah di lokasi yang digunakan kantin sekolah. Namun pembongkaran tidak bisa sampai ujung karena ada tandon air di bagian atas. Menurutnya lebar gapura nantinya lebih karena akses masuk bersifat miring. Tujuannya tidak membongkar bangunan lebih banyak. “Solusi dari kami seperti itu tinggal nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPRK dan Disdikbud,” pungkasnya. **(ak/kri)**

Sumber Berita :

1. Kaltimpost.co.id, Pembangunan Akses Baru SMP 7 Batal, 14/02/2025

Catatan :

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia jasa harus memberikan pengesahaan atau persetujuan atas:
  - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
- e. hasil layanan jasa konstruksi.

